

		UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			HUKUM ACARA	T=2	P=14		
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
		Khristyawan Wisnu Wardana, S.H., M.H.					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;					
	CPL2 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					
	CPL3 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;					
	CPL4 (KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.					
	CPL5(KK)	Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan Menyusun konsep penyelesaian masalah, kasus, dan/atau konflik hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan hubungan industrial melalui konsep berpikir logis, yuridis, sistematis berdasarkan pengetahuan teoritis berkaitan dengan sistem peradilan hubungan industrial.					
	CPL6(P)	Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar dan pemahaman tentang sistem peradilan hubungan industrial.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemajuan peradaban dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila					
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.					

	CPMK3	Mampu menguasai dasar-dasar dalam sistem Peradilan Niaga dan mampu memahami tata cara berpraktik dalam sistem peradilan hubungan industrial
	CPMK4	Mampu menganalisa masalah, kasus, dan/atau konflik tentang sistem peradilan niaga di Indonesia.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar dari sistem hubungan industrial di Indonesia
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang subjek dan objek perselisihan hubungan industrial
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan ciri-ciri khusus dari hubungan Industrial
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prinsip serta sarana pendukung hubungan Industrial
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peran dari para pihak yang ada di hubungan industrial (Pemerintah, Karyawan dan Serikat Pekerja, Perusahaan atau Pengusaha)
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu membedakan proses perkara hubungan industrial dan proses perkara perdata
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang perselisihan hubungan industrial dan macam-macam bentuk perselisihannya
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu memahami tata cara penyelesaian perselisihan dalam pengertian hubungan industrial di Indonesia
	Sub-CPMK9	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami alur penyelesaian hubungan industrial
	Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartite
	Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi
	Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi
	Sub-CPMK13	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis jenis contoh kasus hubungan industrial di dalam perusahaan
	Sub-CPMK14	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan hubungan industrial di Indonesia
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK	

[illegible]

		4. Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) 5. Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) 6. Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.					
		Pendukung : - Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual - Bahan bacaan penunjang dari internet					
Dosen Pengampu		Khristyawan Wisnu Wardana, S.H., M.H.					
Mata Kuliah syarat		Hukum Acara					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar dari sistem hubungan industrial di Indonesia	Ketepatan dalam menjelaskan serta memahami tentang konsep dasar dari sistem hubungan industrial di Indonesia	- Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi - Bentuk: Non Test - Tulisan - Paper - Presentasi - Diskusi Test: - Papar Test	- Kuliah - Diskusi [TM:1x(2x50'')] - PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	- E-Learning Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) - Via Zoom Meeting - Via Classroom - Via Whatsapp	- Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwanto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. - Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat	5%

			▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta :	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang subjek dan objek perselisihan hubungan industrial	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan subjek dan objek perselisihan hubungan industrial	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	7. Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwanto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.	5%

			▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			8. Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) 9. Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) 10. Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) 11. Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) 12. Indonesia, Undang-unda ng Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-unda ng No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-unda ng Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
--	--	--	--	--	--	---	--

3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan ciri-ciri khusus dari hubungan Industrial	Ketepatan dalam menjelaskan untuk menjabarkan ciri-ciri khusus dari hubungan Industrial	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian	5%
---	---	---	---	--	---	--	----

						Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Undang-undang g Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prinsip serta sarana pendukung hubungan Industrial	Ketepatan dalam menjelaskan serta memahami prinsip serta sarana pendukung hubungan Industrial	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi	5%

						Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undan g Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undan g No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peran dari para pihak yang ada di hubungan industrial (Pemerintah, Karyawan dan Serikat Pekerja, Perusahaan atau Pengusaha)	Ketepatan dalam menjelaskan dan memahami peran dari para pihak yang ada di hubungan industrial (Pemerintah, Karyawan dan Serikat Pekerja, Perusahaan atau Pengusaha)	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test)	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan	5%

			▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia,	
--	--	--	---	--	--	---	--

						Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
6	Mahasiswa mampu membedakan proses perkara hubungan industrial dan proses perkara perdata	Ketepatan dalam membedakan proses perkara hubungan industrial dan proses perkara perdata	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H.,	5%

			Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undan	
--	--	--	---	--	--	---	--

						g Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang perselisihan hubungan industrial dan macam-macam bentuk perselisihannya	Ketepatan untuk memberikan penjelasan guna memahami perselisihan hubungan industrial dan macam-macam bentuk perselisihannya	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i>	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwanto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat	5%

			▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta :	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Mahasiswa mampu memahami tata cara penyelesaian perselisihan dalam pengertian hubungan industrial di Indonesia	Ketepatan dalam memahami tentang tata cara penyelesaian perselisihan dalam pengertian hubungan industrial di Indonesia	• Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi • Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan	5%

			▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004)	
--	--	--	--	--	--	---	--

						▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
10	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami alur penyelesaian hubungan industrial	Ketepatan dalam menjelaskan dan memahami alur penyelesaian	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id)	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi	5%

		hubungan industrial	• Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis		▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar	
--	--	---------------------	--	--	---	--	--

						Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undan g Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undan g No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undan g Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
--	--	--	--	--	--	---	--

11	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartite	Ketetapan dalam memahami proses penyelesaian dari perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartite	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan	10%
----	---	---	---	--	---	---	-----

						Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang	
--	--	--	--	--	--	--	--

						g Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
12	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi	Ketepatan dalam memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010)	10%

						▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
13	Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi		● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi	10%

			▪ Kuis			Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun	
--	--	--	--	--	--	--	--

						2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa jenis contoh kasus hubungan industrial di dalam perusahaan	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa jenis contoh kasus hubungan industrial di dalam perusahaan	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasisw	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwarto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009) ▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis	10%

			a (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003) ▪ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
15	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan hubungan industrial di Indonesia	Ketepatan dalam menguasai perkembangan hubungan industrial di Indonesia	● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i>	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ PBL (<i>Problem Based Learning</i>)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	▪ Hubungan Industrial dalam Praktek. Suwanto. 2003. Jakarta Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. ▪ Manan, Bagir. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, cet, pertama, 2009)	15%

			▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			▪ Pangaribuan, Juanda. S.H., M.H. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2010) ▪ Husni, Lalu S.H., M.Hum., Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : Rajawali Pers 2004) ▪ Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial, Cet I, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan 2003)	
--	--	--	---	--	--	---	--

						Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab 7A, Buku III.	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.